

Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* Cobit 2019 Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Liza Safitri¹, Mochammad Rizki Romdoni², Yulia Salsa Putri³

¹Program Studi Teknik Informatika, ² Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang Jalan Pempa Air No. 28 Tanjungpinang Kepulauan Riau Indonesia

Korespondensi email : ¹liza@stindonesia.ac.id

²rizki@stindonesia.ac.id

³yuliasalsaa46@gmail.com

Intisari— Perkembangan pesat teknologi informasi saat ini sangat berdampak pada kondisi bisnis perusahaan, sehingga diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik. COBIT 2019 adalah kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang menyediakan standar untuk penerapannya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan hukum dan HAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kapabilitas proses TI saat ini (*as-is*) dan tingkat kapabilitas proses TI yang diharapkan (*to-be*) serta memberikan rekomendasi dan saran pada tata kelola TI yang lebih baik bagi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Penelitian ini dilakukan menggunakan standar *framework* COBIT 2019. Dari objektif proses yang ada, didapatkan 8 objektif yang sesuai dengan penelitian, yaitu APO04 – *Managed Innovation*, APO07 – *Managed Human Resources*, APO13 – *Managed Security*, BAI02 – *Managed Requirements Definitions*, BAI03 – *Managed Solutions Identification and Build*, DSS03 – *Managed Problems*, DSS05 – *Managed Security Services*, MEA01 – *Managed Performance and Conformance Monitoring*, EDM01 – *Ensured Governance Framework Setting and Maintenance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pada objektif proses APO04 dan EDM01 berada pada tingkat kemampuan level 4 (*as-is*) dengan nilai kemampuan APO04 dan EDM01 sebesar 100%, untuk DSS03 dan MEA01 berada pada tingkat kemampuan level 5 (*as-is*) dengan nilai kemampuan DSS03 dan MEA01 sebesar 100%, untuk APO07 dan APO13 berada pada tingkat kemampuan level 2 (*as-is*), dan untuk domain BAI03 dan DSS05 berada pada tingkat kemampuan level 1 (*as-is*).

Kata kunci— COBIT 2019, Tata Kelola Teknologi Informasi, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri, *Capability*.

Abstract—

The rapid development of information technology today greatly impacts the company's business conditions, so good information technology governance is needed. COBIT 2019 is an information technology governance framework that provides standards for its implementation. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Riau Islands Province is a government agency engaged in legal and human rights services. The aim of this research is to determine the current level of IT process capability (as-is) and the expected level of IT process capability (to-be) as well as providing recommendations and suggestions on better IT governance for the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Riau Islands Province. This research was conducted using standards framework COBIT 2019. From the existing process objectives, 8 objectives were obtained that were in accordance with the research, namely APO04 – Managed Innovation, APO07 – Managed Human Resources, APO13 – Managed Security, BAI02 – Managed Requirements Definitions, BAI03 – Managed Solutions Identification and Build, DSS03 – Managed Problems, DSS05 – Managed Security Services, MEA01 – Managed Performance and Conformance Monitoring, EDM01 – Ensured Governance Framework Setting and Maintenance. The results of this research show that the APO04 and EDM01 process objectives are at the capability level level 4 (as-is) with a capability value of APO04 and EDM01 of 100%, for DSS03 and MEA01 it is at the capability level level 5 (as-is) with a DSS03 and MEA01 capability value of 100%, for APO07 and APO13 it is at the capability level level 2 (as-is), and for domains BAI03 and DSS05 are at the capability level level 1 (as-is).

Keywords— COBIT 2019, Information Technology Governance, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Riau Islands Province, *Capability*.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi perusahaan, baik yang meraih keuntungan maupun yang tidak. Dalam banyak kasus, perusahaan/instansi telah menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah berbagai tugas mereka dan meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kerja [1]. Bagaimana teknologi informasi diterapkan dalam suatu organisasi atau industri tergantung pada sejauh mana organisasi tersebut mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. [2]. Penggunaan teknologi informasi (TI) di instansi pemerintahan, khususnya dalam bidang perkara, tidak hanya terbatas pada pegawai yang bertugas di bagian TI, tetapi juga wajib bagi seluruh pegawai di berbagai bagian, seperti administrasi, keuangan, pidana, perdata, dan lainnya

yang terkait dengan TI. Penerapan TI dalam bidang perkara di instansi pemerintahan mendukung adanya Sistem Informasi (SI) yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk pengambilan keputusan serta mendukung operasional yang terorganisir [3].

Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT *Governance* merupakan hal yang penting dalam pengawasan atau pengelolaan teknologi informasi dan risiko dalam suatu perusahaan bahkan instansi. Tanpa tata kelola yang baik, perusahaan akan sulit untuk melihat seberapa tinggi kinerja penerapan TI suatu perusahaan [4]. Tujuan TTKTI yaitu memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dalam suatu organisasi dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. [5]. Nazhara Aurellia Hakim, Iqbal Santosa, dan Luthfi Ramadani menyatakan bahwa COBIT 2019, yang dikembangkan oleh ISACA, dianggap sebagai kerangka kerja yang sangat fleksibel dan paling komprehensif dalam pengelolaan teknologi informasi. [6]. Teknologi informasi diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, kebutuhan sumber daya manusia, dan perubahan pada model bisnis [7].

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu kantor perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertanggung jawab mengelola dan mengawasi berbagai aspek hukum dan HAM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri berperan dalam administrasi hukum, keimigrasian, pemyarakatan dan pelayanan hak asasi manusia serta membawahi 21 UPT yang ada di Provinsi Kepulauan Riau [8].

Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kepri saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan dan pengelolaan teknologi informasi, termasuk masalah akses jaringan yang lambat dan tidak stabil. Seringkali, akses jaringan yang menghubungkan berbagai kantor di Kemenkumham mengalami keterlambatan dan ketidakstabilan. Hal ini terutama berasal dari *server* jaringan pusat yang tidak selalu dapat diprediksi. Kelemahan dalam keamanan sistem, insiden kebocoran data pernah terjadi karena server pusat pernah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga server pusat harus dimatikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa perlindungan data dan sistem keamanan yang ada masih belum cukup kuat untuk menangkap serangan siber. Adapun, beberapa aplikasi yang digunakan memiliki fungsi yang hampir sama, yang membedakan hanya beberapa fitur saja, yang dapat menyebabkan duplikasi usaha dan inefisiensi.

Sebuah strategi perencanaan SI/TI yang komprehensif dan efektif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kerangka kerja COBIT 2019 menyediakan panduan untuk tata kelola dan manajemen TI yang terstruktur, yang memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis, memberikan nilai dan meminimalkan resiko [9]. Hasil akhir dari penelitian ini adalah pemberian rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan perusahaan pada objektif proses yang telah didapatkan.

B. Identifikasi Masalah

Setelah melakukan pengamatan, wawancara, dan observasi maka penulis menemukan atau menentukan masalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengelolaan & pengoptimalan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan mengenai kurangnya pengelolaan SDM yang berpengaruh terhadap sumber daya TI sehingga belum optimal, salah satunya keterbatasan jumlah SDM dan *skill* dalam operasional Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri.
- 2) Konektivitas jaringan yang terkadang tidak stabil dan lambat, biasa terjadi pada server pusat sehingga menghambat akses terhadap layanan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri.
- 3) Kurangnya pemahaman tentang pengamanan informasi dan keamanan siber pada sistem informasi yang digunakan.
- 4) Kesamaan fungsi dan penggunaan pada aplikasi yang digunakan, yang membedakan hanya beberapa tambahan fitur saja, yang menyebabkan duplikasi usaha dan inefisiensi.

C. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak meluas serta sesuai dengan tujuan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Fokus pada aspek tata kelola infrastruktur TI, sistem informasi dan SDM TI.
- 2) Membatasi analisis pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Tidak termasuk analisis terhadap unit kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri.
- 3) *Framework* yang digunakan adalah *framework* COBIT 2019.
- 4) Analisis aktivitas mengevaluasi model dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian dan harapan pada kapabilitas proses. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Capability Model, yang menilai tingkat kapabilitas menggunakan skala Guttman. Objektif proses yang dievaluasi diambil berdasarkan pemetaan masalah.
- 5) Responden dibatasi berdasarkan RACI *Chart*. Rekomendasi dari hasil evaluasi berupa usulan perbaikan dalam pengelolaan TI yang diperoleh melalui analisis kesenjangan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Studi Pustaka

Melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan topik pembahasan, dilakukan dengan membaca dan memahami studi *literature* dari jurnal dan beberapa buku. Yakni buku COBIT® 2019 *Framework: Introduction and Methodology*, modul kedua adalah COBIT® 2019 *Framework: Governance and Management Objectives*, Laporan Tahunan Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri Tahun 2023 dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

B. Studi Lapangan

Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid tentang permasalahan penelitian antara lain :

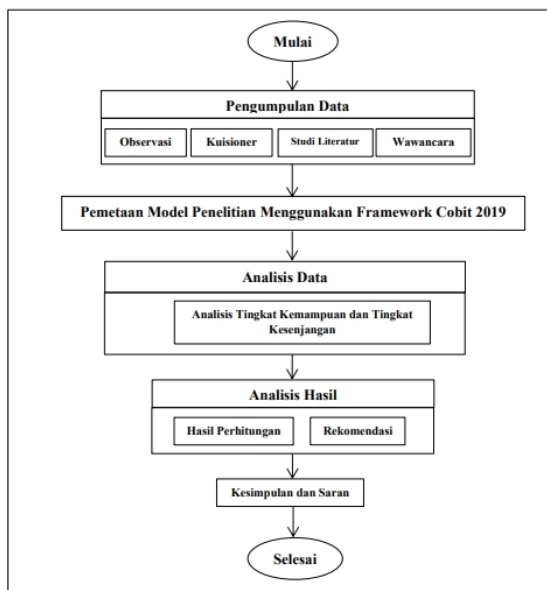
- 1) Wawancara
Memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan data.
- 2) Observasi
Metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung dan memperoleh data yang lebih valid.
- 3) Dokumentasi
Pengumpulan data, baik dari dokumen cetak maupun digital, seperti Renstra 2020-2024 dan Laporan Tahunan 2023 Kanwil Kepri, dilakukan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan guna sebagai pendukung kelengkapan data yang lain.
- 4) Kuesioner
Pengumpulan data melalui survei menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden sesuai dengan matriks RACI dan kerangka kerja COBIT 2019.

C. Metode COBIT 2019

COBIT 2019 adalah semacam "buku panduan" yang dikeluarkan oleh ISACA untuk membantu perusahaan mengatur dan mengelola sistem teknologi informasi mereka secara efektif. Sebagai versi terbaru dari COBIT 5, panduan ini memberikan petunjuk yang lebih detail dan menyeluruh tentang cara mengelola tata kelola TI. COBIT 2019 terbagi menjadi 5 bagian utama, masing-masing dengan tujuan dan proses yang spesifik. Panduan ini juga dapat dikombinasikan dengan standar lain yang relevan. [8].

Pada penelitian ini penggunaan metode COBIT 2019 lebih fokus ke domain yang didapat pada pemetaan masalah yakni, APO04, APO07, APO13, BAI03, DSS03, DSS05, EDM01, MEA01.

D. Alur Penelitian



Gambar 1. Alur Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan alur penelitian yang merujuk dari gambar 1 diatas:

- 1) Tahap awal dimulai dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara terkait tata kelola TI yang ada pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Setelah masalah teridentifikasi, penelitian dilanjutkan dengan kajian pustaka yang mendalam, merujuk pada berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan laporan perusahaan.
- 2) Setelah pengumpulan data dilakukan, dilanjut dengan pemetaan masalah menggunakan *framework* domain COBIT 2019.
- 3) Setelah data dari kuesioner tentang COBIT 2019 terkumpul, data tersebut akan kita olah. Pengolahannya meliputi dua tahap: pertama, kita akan melihat sejauh mana kemampuan atau kapabilitas yang sudah dimiliki (analisis kapabilitas). Kedua, kita akan membandingkan kapabilitas yang ada dengan yang seharusnya dimiliki (analisis kesenjangan). Setelah itu, kita akan merangkum dan menyimpulkan hasil dari kedua analisis tersebut.
- 4) Selanjutnya, analisis hasil berupa hasil perhitungan dengan memberikan rekomendasi terhadap pihak manajemen TI.
- 5) Setelah mendapat rekomendasi, langkah akhir penelitian adalah menyimpulkan dan memberikan saran.

III. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tata Kelola TI

Tata kelola TI adalah bagian dari aturan main perusahaan secara keseluruhan. Aturan ini khusus mengatur tentang teknologi informasi. Tujuannya agar teknologi informasi bisa mendukung perusahaan mencapai tujuannya dan terus berkembang. [10]. IT Governance pada dasarnya adalah tentang bagaimana pimpinan perusahaan memastikan bahwa departemen IT memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan [11].

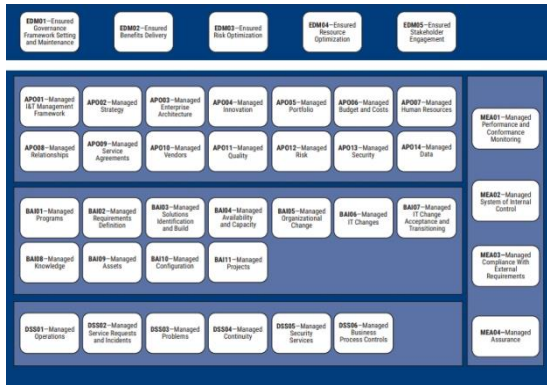
B. Evaluasi Tata Kelola TI

Evaluasi Tata Kelola TI merupakan suatu proses dalam mengukur pencapaian suatu nilai dalam suatu instansi/organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak manajemen pada tingkatan atas dan untuk mengelola teknologi informasi yang dimiliki ini agar dapat berjalan sejalan dengan strategi dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan [12].

C. COBIT

COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) merupakan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk memastikan tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi yang efektif di semua organisasi. [13]. Kerangka kerja COBIT secara tegas membedakan antara tata kelola dan manajemen, yang masing-masing memiliki lingkup aktivitas, struktur organisasi, dan tujuan layanan yang unik. COBIT menyediakan komponen-komponen esensial untuk

membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang efektif, mencakup proses, struktur organisasi, kebijakan, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Hal ini berbeda dengan COBIT 5 dimana COBIT 5 merupakan kerangka kerja komprehensif yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan aset dan sumber daya teknologi informasi bagi berbagai entitas, termasuk perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah, dengan tujuan optimalisasi kinerja dan pencapaian sasaran strategis[14].



Gambar 2. COBIT 2019 [14]

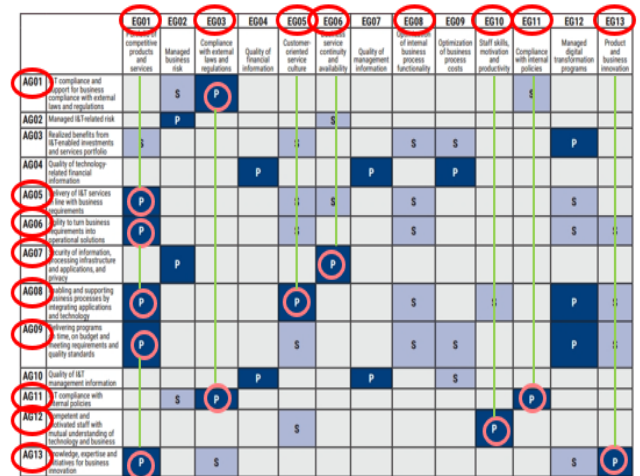
COBIT 2019 merupakan evolusi dari versi COBIT sebelumnya yaitu COBIT 5. Versi COBIT 2019 dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi masa sekarang sehingga COBIT 2019 bersifat fleksibel. Pada COBIT 2019 memiliki fokus area yang membuatnya lebih praktis dan dapat disesuaikan dengan perusahaan melalui pemilihan *objective* (proses) sehingga selaras dengan strategis dan tujuan bisnis perusahaan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah COBIT 2019 yang merupakan kerangka kerja pengembangan dari versi sebelumnya yaitu COBIT 5.

D. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri

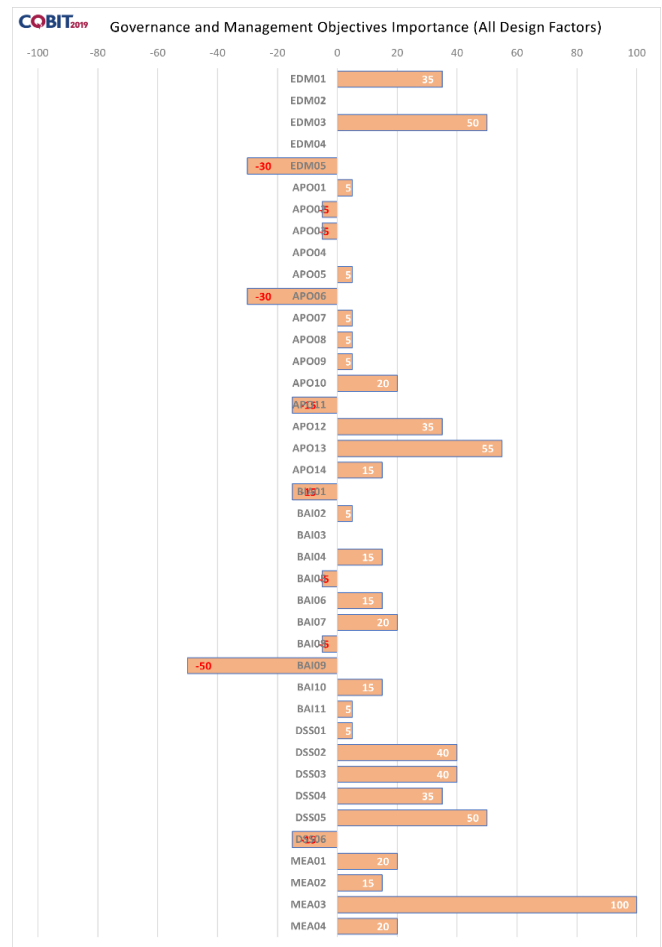
Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjalankan kebijakan hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Riau. Kantor ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM di wilayah tersebut. Selain itu, kantor ini juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti membantu dalam urusan administrasi hukum, pendaftaran hak cipta dan merek, perlindungan hak asasi manusia, urusan paspor, serta pembinaan narapidana.n [15].

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ini, analisis data lapangan merupakan inti dari penelitian kami. Dengan mengkaji data yang kami kumpulkan langsung dari lokasi, kami dapat melakukan penyelarasan antara visi, misi, strategi, dan penerapan teknologi informasi dengan kerangka kerja COBIT 2019. Langkah awal yang kami lakukan adalah menentukan tujuan utama perusahaan (Enterprise Goals). Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi tujuan-tujuan yang selaras (Alignment Goals) untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Proses ini akan membantu kami dalam merancang solusi teknologi informasi yang optimal untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis.



Gambar 3. Hasil Mapping Enterprise Goals to Alignment Goals Setelah menentukan tujuan umum (Alignment Goals), langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan spesifik dan terukur untuk tata kelola dan manajemen (Governance and Management Objective). Tujuan-tujuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi tujuan-tujuan proses yang lebih detail, dengan mempertimbangkan berbagai faktor penentu (Design Factors). Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan-tujuan proses ini memiliki tingkat kepentingan dan kemampuan yang berbeda-beda, mulai dari yang sangat penting dan sudah tercapai dengan baik hingga yang masih perlu ditingkatkan.



Gambar 4. Kesimpulan Design Factor

A. RACI Chart

RACI Chart adalah alat bantu untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap individu atau tim dalam suatu aktivitas. Singkatan RACI sendiri merepresentasikan Responsible (yang melakukan), Accountable (yang bertanggung jawab), Consulted (yang perlu dikonsultasikan), dan Informed (yang perlu diberitahu). Berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019, hanya pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan suatu tugas, yaitu yang bertanggung jawab (Responsible) dan yang memiliki kewenangan penuh (Accountable), yang dianggap relevan untuk dijadikan narasumber dalam penelitian. [16]. Penelitian ini melibatkan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi & TI, dua staf TI, dan seorang Kepala Bidang Program & Pelaporan sebagai responden. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metrik yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan pengumpulan data lebih lanjut. [17].

Tujuan dari penilaian rating adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan yang telah dicapai. Dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal.

TABEL I

BESARAN RATING CAPABILITY LEVEL

Skala	Keterangan	Pencapaian (%)
N	Not Achieved	0 – 14
P	Partially Achieved	15 – 49
L	Largely Achieved	50 – 84
F	Fully Achieved	85 – 100

B. Hasil Penelitian

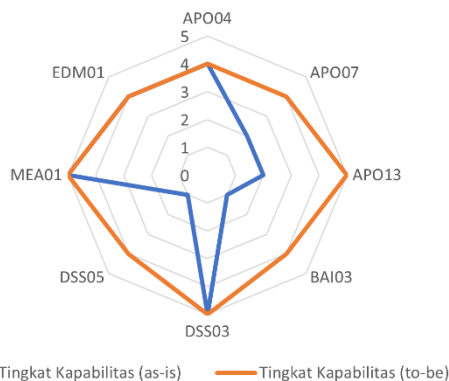
Pengolahan data kuesioner yang sudah terisi lengkap dilakukan menggunakan perhitungan rata-rata. Pengukuran besaran *rating* pada tahap pengolahan data menggunakan rumus perhitungan persentase. Hasil dari perhitungan besaran skala (*rating*) pada setiap objektif dapat dilihat dibawah ini:

1. Besaran *rating* objektif APO04 level kapabilitas 4: $\frac{400}{4} \times 100\% = 100\%$ (Fully).
2. Besaran *rating* objektif APO07 level kapabilitas 3: $\frac{110}{4} \times 100\% = 25\%$ (Partially)
3. Besaran *rating* objektif APO13 level kapabilitas 3: $\frac{266,64}{4} \times 100\% = 66,66\%$ (Largely)
4. Besaran *rating* objektif BAI03 level kapabilitas 2: $\frac{228,56}{4} \times 100\% = 57,14\%$ (Largely)
5. Besaran *rating* objektif DSS03 level kapabilitas 5: $\frac{400}{4} \times 100\% = 100\%$ (Fully)
6. Besaran *rating* objektif DSS05 level kapabilitas 2: $\frac{231,25}{4} \times 100\% = 57,81\%$ (Largely)
7. Besaran *rating* objektif MEA01 level kapabilitas 5: $\frac{400}{4} \times 100\% = 100\%$ (Fully)
8. Besaran *rating* objektif EDM01 level kapabilitas 4: $\frac{400}{4} \times 100\% = 100\%$ (Fully)

Nilai peringkat yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar kinerja yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan TI Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri. Grafik pada Gambar 4 memperlihatkan disparitas yang mencolok antara ekspektasi kinerja dan hasil evaluasi pada beberapa dimensi. Jarak antara kedua titik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa rekomendasi perbaikan akan diusulkan.

TABEL II
TABEL CAPABILITY LEVEL PER SUB DOMAIN

NO	DOMAIN	PROSES	Capability Level
1	APO 04	Mengelola Inovasi	4
2	APO 07	Mengelola SDM	2
3	APO 13	Mengelola Keamanan	2
		Mengelola dan Mengidentifikasi	
4	BAI 03	Pengembangan Solusi	1
5	DSS 03	Mengelola Masalah	5
		Mengelola Layanan	
6	DSS 05	Keamanan	1
		Kinerja Terkelola dan	
7	MEA 01	Pemantauan Kesesuaian	5
		Pengawasan Tata Kelola dan Pemeliharaan	
8	EDM 01		4



Gambar 5. Kesenjangan Tingkat Kapabilitas

C. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi APO04

Hasil temuan APO04 “Managed Innovation” pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri untuk tingkat kapabilitas berapa pada level 4, dimana nilai yang diharapkan juga 4, ini dihasilkan berdasarkan perhitungan kuesioner yang diisi oleh para responden. Karena tingkat kapabilitasnya sesuai dengan yang diharapkan dimana didalamnya tidak terdapat *gap*. Maka rekomendasi yang diberikan agar Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri dapat mengukut kinerjanya lebih baik lagi dan melakukan perbaikan terus-menerus.

D. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi APO07

Kanwil Kemenkumham saat ini mengalami kurangnya pengelolaan & pengoptimalam SDM, yaitu masih keterbatasan jumlah SDM dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan

pada Kanwil Kemenkumham. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri dapat melakukan analisis kebutuhan SDM yang lebih akurat dan jenis keterampilan SDM yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan sumber daya TI yang dimiliki.
2. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri dapat merancang program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan yang mencakup pelatihan berkala dan peningkatan keterampilan pegawai dalam menghadapi perkembangan teknologi yang akan terus *up to date*.

E. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain APO13

Hasil evaluasi yang didapatkan pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri yaitu Kanwil belum ada aplikasi yang membantu tugas monitoring, hanya memiliki dokumentasi berupa laporan monitoring kegunaan dan kelancaran dan gangguan. Maka rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan hasil evaluasi tersebut yaitu [18]:

1. Sebaiknya Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri menginisiasi pembentukan sebuah divisi khusus yang bertugas secara spesifik dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen keamanan informasi.
2. Menjalankan program audit internal keamanan secara berkala serta menilai Tingkat efektivitas prosedur kebijakan keamanan informasi sudah sesuai atau belum.

F. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain BAI03

Berdasarkan hasil evaluasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri didapatkan informasi bahwa evaluasi atau monitoring TI di Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri belum dilakukan secara maksimal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu [19]:

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri dapat melakukan pengujian solusi TI dalam bentuk simulasi agar pengujian dapat semirip mungkin dengan kondisi nyatanya, misalnya pengujian dokumentasi *error* dan lain sebagainya.

G. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain DSS03

Dalam hal manajemen masalah TI, sub-bagian TI telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Mereka telah berhasil mendokumentasikan semua masalah layanan TI, menganalisis penyebab mendasarnya, serta secara aktif meningkatkan pengetahuan staf terkait manajemen masalah. Selain itu, mereka telah melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas upaya mereka. Berdasarkan hasil evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri telah mencapai tingkat kapabilitas manajemen masalah yang optimal, yaitu level 5 dimana nilai yang diharapkan juga 5, ini dihasilkan berdasarkan perhitungan kuesioner yang diisi oleh para responden. Karena tingkat kapabilitasnya sesuai dengan yang diharapkan dimana didalamnya tidak terdapat *gap*. Maka rekomendasi yang diberikan Kanwil Kemenkumham Kepri dapat mengukur kinerjanya lebih baik lagi dan melakukan perbaikan terus-menerus.

H. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain DSS05

Hasil evaluasi pada domain DSS05 menghasilkan bahwa saat ini Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri mengalami kurangnya pemahaman tentang pengamanan informasi dan keamanan siber yang dapat menyebabkan kebocoran informasi data pribadi maupun rahasia. Kanwil saat ini belum mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar agar informasi dan jaringan perusahaan terlindungi. Selanjutnya, belum adanya pengontrolan dan pembatasan akses ke jaringan komputer melalui perangkat *mobile*, pembatasan akses situs *web* yang tidak aman, maupun pembatasan unduhan *file*.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu [20]:

1. Kanwil Kemenkumham dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan dalam hal kesadaran dan keamanan informasi.
2. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri perlu memiliki pengawasan dan pengelolaan keamanan informasi yang memadai di lingkungan kerja. Hal ini bisa mencakup penggunaan perangkat lunak pemantauan jaringan dan keamanan informasi, serta pembuatan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstandarisasi. Dengan begitu, akan membantu mengurangi resiko dan mencegah terjadinya pelanggaran keamanan informasi di lingkungan kerja.

I. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain MEA01

Berdasarkan wawancara kepada salah satu *staff* sub bagian humas, reformasi birokrasi dan teknologi informasi, Kanwil Kemenkumham belum menggunakan aplikasi sebagai media evaluasi sistem informasi, hanya berupa laporan monitoring kegunaan, kelancaran dan gangguan. Namun, tingkat kapabilitas pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri berada pada *level 5*, dimana nilai yang diharapkan juga 5, ini dihasilkan berdasarkan perhitungan kuesioner yang diisi oleh para responden. Karena tingkat kapabilitasnya sesuai dengan yang diharapkan dimana didalamnya tidak terdapat *gap*. Maka rekomendasi yang diberikan Kanwil Kemenkumham Kepri dapat mengukur kinerjanya lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan terus-menerus. Dan mencoba untuk membangun sebuah aplikasi untuk monitoring sehingga evaluasi lebih teroptimalkan.

J. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Domain EDM01

Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri sudah memahami pentingnya pengawasan internal untuk tata kelola TI, namun pelaksanaannya perlu diperkuat agar rencana yang telah dibuat dapat berjalan sesuai harapan. Tingkat kapabilitas pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri berada pada *level 4*, dimana nilai yang diharapkan juga 4, ini dihasilkan berdasarkan perhitungan kuesioner yang diisi oleh para responden. Karena tingkat kapabilitasnya sesuai dengan yang diharapkan dimana didalamnya tidak terdapat *gap*. Maka rekomendasi yang diberikan Kanwil Kemenkumham Kepri dapat mengukur kinerjanya lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan terus-menerus.

Dari beberapa aspek tata kelola TI yang sudah berjalan dan belum berjalan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri, dengan mengacu pada *framework* COBIT 2019. Namun,

terdapat beberapa *objective process* yang perlu diperbaiki, terutama yang terkait dengan inovasi, sumber daya manusia, dan layanan keamanan. Hal ini bisa menjadi acuan untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kemajuan serta keberhasilan instansi dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri perlu meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi terbaru dan mengembangkan inovasi yang relevan. Dengan memanfaatkan TI dalam hal pelayanan dan penggunaan TI yang lebih *modern* dan terintegrasi. Untuk mencapai itu, maka diperlukannya juga pelatihan pada staff ataupun pengembangan karyawan dalam bidang sumber daya manusia. Dalam hal layanan keamanan, Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri perlu memperkuat sistem keamanan mereka dan mengidentifikasi potensi risiko keamanan yang dapat mempengaruhi organisasi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian akses, enkripsi data, serta penerapan kebijakan keamanan yang ketat. Adapun pembuatan aplikasi monitoring yang dapat mempermudah *stakeholder* dalam melakukan evaluasi terhadap sistem informasi yang ada.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Evaluasi TKTI pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepri disarankan untuk dapat dilakukan secara berkala agar tingkat kemampuan yang diharapkan bisa tercapai.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan evaluasi terhadap objektif proses APO04, APO07, APO13, BAI03, DSS03, DSS05, MEA01 dan EDM01 seperti yang telah digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui perkembangan dari perbaikan terhadap penerapan aktivitas pada proses tersebut kedepannya
- 3) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan fokus yang sama yaitu evaluasi TKTI, dengan menggunakan standar kerangka kerja selain COBIT 2019 seperti ISO/IEC 38500.

VI. REFERENSI

- [1] A. W. Pradipta and A. D. Manuputty, "Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Salatiga," *J. Softw. Eng. Ampera*, vol. 3, no. 3, pp. 153–169, 2022, doi: 10.51519/journalsea.v3i3.287.
- [2] M. Ikhsan and Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Proses Pengelolaan Inovasi dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 di PT. XYZ," *J. Comput. Sci. Informatics Eng.*, vol. 6, no. 1, pp. 47–55, 2022, doi: 10.29303/jcosine.v6i1.430.
- [3] F. Febriani and A. D. Manuputty, "Evaluasi Tata Kelola Guna Meningkatkan Kinerja Manajemen Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 7, no. 1, pp. 71–84, 2021, doi: 10.28932/jutisi.v7i1.3260.
- [4] C. Lumingkewas, J. Y. Mambu, and A. Wahyudi, "Identification of IT Governance Capability Level of COBIT 2019 at The KOMINFO City of Bitung, North Sulawesi," *TeIKa*, vol. 13, no. 01, pp. 1–15, 2023, doi: 10.36342/teika.v13i01.3064.
- [5] B. A. M. Pangaribuan and S. Fernandez, "Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 Pada Val," *J. Ilm. Komput. Graf.*, vol. 16, no. 1, pp. 196–208, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.51903/pixel.v16i1.1247>
- [6] N. A. Hakim, I. Santosa, and L. Ramadani, "Asesmen Dan Peningkatan Manajemen Proyek Sistem Informasi Pada Area Scope Management Dan Time Management Menggunakan Pmmm (Studi Kasus : Puti Universitas Telkom)," *JUPI (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 7, no. 3, pp. 935–944, 2022, doi: 10.54314/jpsi.v7i3.3173.
- [7] M. A. Saputra and M. R. Redo, "Penerapan Framework Cobit 2019 Untuk Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi," *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 4, no. 3, p. 352, 2021, doi: 10.54314/jssr.v4i3.715.
- [8] K. K. P. Kepri, "Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024," -, vol. 01, pp. 1–66, 2021.
- [9] M. Jaelani and A. Azis, *Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada*. 2023.
- [10] D. Ariyadi, "Konsep Tata Kelola TI," p. 132, 2021.
- [11] M. Adhisyanda Aditya, R. Dicky Mulyana, A. Mulyawan, S. LIKMI Bandung, and S. Mardira Indonesia, "Perbandingan Cobit 2019 Dan Itil V4 Sebagai Panduan Tata Kelola Dan Management It," *J. Comput. Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 100–105, 2019.
- [12] M. Muthmainnah, S. Safwandi, M. Jannah, and V. Ilhadi, "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Proses Dss03 Dan Mea01 Di Universitas X," *Sisfo J. Ilm. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2021, doi: 10.29103/sisfo.v5i1.4848.
- [13] ISACA, *COBIT 2019 Framework - Introduction and Methodology*. 2019.
- [14] L. Safitri and Arpelasari, "Analisis Efektivitas Aplikasi Cek DJP Online Pajak dan Laporan SPT Tahunan E-filling Menggunakan Framework COBIT 5 Domain EDM (Evaluate, Direct, and Monitor) pada KPP Pratama Tanjungpinang", *Bangkit Indonesia*, Vol. X, No.02, 2021.
- [15] K. K. P. Kepri, "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023," pp. 1–165, 2024.
- [16] F. Zukhriadna Afriliandra and A. Reza Perdanakusuma, "Evaluasi Tata Kelola Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada PT XYZ menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019," *Manaj. Risiko TI, Capab. Lev.*, vol. 6, no. 12, p. 12, 2022, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [17] ISACA, *COBIT® 2019 Implementation Guide: Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution*. 2018.
- [18] T. M. Insani, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Balai Penelitian Sungai Putih Menggunakan Framework Cobit 2019," vol. 3, no. 2, p. 6, 2021.
- [19] R. L. V. Nyoto and N. Nyoto, "Analisis Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Perguruan Tinggi Xyz Menggunakan Cobit 2019," *JOISIE (Journal Inf. Syst. Informatics Eng.*, vol. 7, no. 1, pp. 25–34, 2023.
- [20] A. Aleksi and M. Afrina, "Pengukuran Tingkat Kematangan Layanan TI Pada UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya Menggunakan Framework COBIT 2019," *J. Sist. dan Teknol. Inf.*, vol. 11, no. 3, p. 389, 2023, doi: 10.26418/justin.v11i3.58520.